

BAB 5

SOEHARTO DAN RESPON TERHADAP BERDIRINYA IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM INDONESIA

Pada tahun 1985-1998 dinamakan *Pola Integrasi Simbiosis* yang mana pada periode ini hubungan antara Islam dan pemerintah membaik karena mereka merasa saling membutuhkan. Salah satu buktinya adalah pemerintah mengeluarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) dari tiga menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Selain itu juga lahir pula berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Pendidikan Nasional (1988), Undang-undang Peradilan Agama (1989), berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berkat dukungan pemerintah pada 1990, SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang efektivitas zakat (1991) bahkan hingga Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang perizinan pemakaian busana muslimah (jilbab) kepada para siswi. Hasil ini didapatkan tak terlepas dari upaya perjuangan intelektual muda Islam kala itu.

Menjelang tahun 1990-an, Soeharto mulai menunjukkan simpati politiknya kepada kelompok politik Islam. Di samping hal-hal yang disebutkan pada paragraf sebelumnya, Soeharto juga mengizinkan sistim perbankan Islam yang dikenal dengan Bank Muamalat dan terjadinya perubahan penampilan ABRI yang sebelumnya

anti-Islam menjadi tidak anti Islam. Hal itu terbukti dengan dilibatkannya perwira santri atau simpatisan Islam ke dalam kepemimpinan militer

5.1 Soeharto dan Perubahan Politik Islam Orde Baru

Transisi dari eksklusivitas menuju inklusivitas Islam mencerminkan transformasi sosial ummat, yang memengaruhi konsep "ummat", "aspirasi ummat", dan wahana penyebarannya. Jika dulu "Muslim" dipahami sebagai komunitas (masyarakat dalam arti sempit), seperti anggota partai Islam, organisasi Islam atau lembaga keagamaan Islam, "Muslim" sekarang diartikan sebagai masyarakat (masyarakat dalam arti luas). Yakni, siapa saja yang mengaku mengikuti agama Islam tanpa mempertanyakan ketaatannya.

Saat istilah "umat" berubah, istilah "aspirasi umat" juga berubah. Jika sebelumnya cita-cita tersebut lebih dekat dengan gagasan negara ideal, kini cita-cita tersebut membutuhkan sistem kehidupan yang rasional dan empiris, seperti kebutuhan untuk mendukung demokrasi dan keadilan. Oleh karena itu, sarana penyaluran upaya juga berubah, tidak hanya terbatas pada organisasi politik dan parlemen, tetapi pada semua lembaga sosial yang mendukung terwujudnya demokrasi dan keadilan. Perubahan konsep "umat" dan "aspirasi umat" sejalan dengan perkembangan Islam sebagai gerakan budaya. Menurut Kunto Wijoyo, Islam sebagai gerakan budaya terdiri dari tiga sub gerakan, yaitu gerakan intelektual, etis, dan estetis.

Islam sebagai gerakan intelektual berarti gerakan yang mengangkat nilai-nilai

Islam ke dalam konsep-konsep ilmiah yang bersaing dengan konsep-konsep pengetahuan yang berkembang ketika Al-Qur'an sangat kaya akan nilai-nilai yang perlu diangkat menjadi semangat dan nilai ilmiah sains yang mempengaruhi nasib peradaban manusia.

Islam sebagai gerakan etis berarti gerakan yang menambahkan seperangkat sikap (ethos) pada tahap perkembangan tertentu. Misalnya, etos kapitalisme dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan. Islam menambah kesetaraan, keadilan, persekutuan, dll. Pertumbuhan dalam Islam merupakan alat kemakmuran yang harus diwujudkan melalui pemerataan, keadilan dan kebersamaan atau partisipasi, bukan sebagai tujuan pembangunan itu sendiri. Perkembangan Islam sebagai gerakan budaya tampaknya dimotori oleh perubahan arah pemikiran Islam yang dewasa ini terjadi dengan sangat pesat. Namun secara keseluruhan, konsep budaya Islam (intelektual, etis, estetis) masih jauh dari kesempurnaan.

Menariknya, perubahan arah pemikiran Islam itu dibarengi dengan restrukturisasi lembaga keagamaan Islam dan munculnya berbagai kelompok baru, serta *community development* (NGO) dan kelompok yang bergerak di bidang agama Islam. Studi Ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, HMI, dll menata diri sesuai kebutuhan umat.

Di masa lalu, organisasi seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah di lingkungan Muhammadiyah, serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Pemuda Ansor, Muslimat dan

Fatayat NU berperan sebagai penggerak massa. Organisasi ini telah menjadi sarana untuk mengembangkan orang-orang yang berbagi tanggung jawab masing-masing.

Mengembangkan semua itu, pemerintah memberikan penghargaan kepada umat Islam atau memperhitungkan kepentingan umat Islam dalam berbagai bentuk, seperti penyesuaian struktural; Mengesahkan UU Perkawinan 1974, UU Peradilan Agama 1989, Ikhtisar Hukum Islam 1991, mengubah peraturan tentang seragam sekolah, dalam hal ini penggunaan jilbab 1991, keputusan bersama menteri tentang Amil Zakat, Infak dan Shadakah juga 1991, dan lain-lain.¹

Saat itu atau pada tahun 1980-an hingga akhir era Orde Baru, gerakan Islam sangat diminati. Menarik karena memiliki landasan teologis yang kemudian berkembang menjadi wacana komersial yang berbeda dari sebelumnya. Diskusi ini juga mengarah pada praktik-praktik lain. Inilah yang disebut Donald K. Emmerson sebagai wacana Islam, menekankan dimensi budayanya, jika tidak sepenuhnya apolitis.²

Oleh karena itu, lahirnya ICMI pada tahun 1990-an juga dapat dilihat sebagai benih kebangkitan kembali cita-cita Islam yang membentuk kehidupan bernegara. Meski tidak bisa dikatakan mendukung Syariat Islam, ICMI didukung oleh intelektual muslim, Dr. Ir. BJ Habibie, Menteri Riset dan Teknologi saat itu, memberi lampu hijau

¹ Muh. Muh. Fatkhan Syamsuddin, 'Dinamika Islam Pada Masa Orde Baru', *Jurnal Dakwah*, XI.2 (2010), 139-56.

² Emmerson.

untuk kebangkitan Islam, yang sepertinya tertidur dan di ujung tanduk.

Fenomena lain adalah persetujuan pemerintah terhadap pembentukan Bank Muamalah, bank berdasarkan sistem Syariah yang menghindari sistem riba tradisional, dan beberapa kepribadiannya beralih dari Hefner ke Senayan. Antropolog dan Indosianis, diucapkan sebagai Senayan kehijauan atau kehijauan, hijau selalu berarti Islam. Seperti disebutkan dalam pendahuluan, langkah ini diambil Soeharto hanya untuk menyelamatkan tahtanya. Gambaran lain tentang keadaan gerakan Islam pimpinan Soeharto adalah sebagai berikut: *Pertama*, proses politisasi gerakan digambarkan sebagai kekuatan-kekuatan Islam merdeka yang bertahan dan menjauhkan diri dari pemerintahan Soeharto dengan kekuatan debat kultural-Islam. *Kedua*, mengkaji periode ketika Soeharto mulai mengkhawatirkan keamanan kekuasaannya akibat ancaman Islamis pra-kemerdekaan laten. Pada fase ini, Soeharto mencoba merayu umat Islam dengan bergabung bersama mereka di Senayan, menyebarkan syariat Islam dan mendirikan organisasi-organisasi bercorak Islam.

Soeharto juga mengizinkan sistem perbankan syariah yang dikenal sebagai Bank Muamalat dan perubahan penampilan ABRI yang sebelumnya anti Islam menjadi kurang anti Islam. Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan perwira santri atau umat Islam dalam kepemimpinan militer.³

³ Restu Gunawan, *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Orde Baru Dan Reformasi* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2009).

5.2 Faktor Pendukung Perubahan Politik Islam Soeharto

Tahun 1990-an adalah masa ketika Soeharto berusaha mengurangi ketergantungannya pada ABRI. Kemungkinan besar, ini terjadi karena komentar kritis dari para jenderal. Tahun 1990-an juga merupakan masa kedekatan Soeharto dengan politik Islam dan masa kejayaan kekuatan hijau. Seperti Pangabina, Faisal setia kepada Soeharto. Bagi Faisal, Soeharto diperkirakan akan terpilih kembali menjadi presiden untuk ketujuh kalinya.⁴

Sebagai pengamat, Harold Crouch melakukan penelitian seobjektif mungkin. Penunjukan Faisal dan Hartono ini sangat istimewa karena sama-sama berasal dari "santri" dan memiliki kedekatan dengan kelompok muslim.⁵ Panglima ABRI Feisal Tanjung dan KSAD R. Hartono adalah dua jenderal yang masuk dalam kategori hijau ABRI. Faisal Tanjung berasal dari keluarga Muhammadiyah dari pantai barat Sumatera Utara.

Ibunya, R. Hartono, adalah seorang aktivis Aisyiyah (peneliti perempuan Muhammadiyah) di Madura, Jawa Timur. Alasan ini juga sudah bisa ditebak oleh Soeharto, yang sepertinya ingin mendapatkan dukungan dari komunitas Muslim yang sebelumnya "agak berjarak".⁶

⁴ Aziz Ahmadi Solemanto, *Feisal Tanjung, Terbaik Untuk Rakyat Terbaik Bagi ABRI* (Jakarta: Yayasan Dharmapena Nusantara, 1999).

⁵ Harold Crouch, *Army and Politics In Indonesia*, Cetakan 1 (Oxford University Press, 1999).

⁶ Petrik Matanasi, 'Jelang Soeharto Lengser, Sebagian ABRI Hijau Menjadi ABRI Kuning', *Tirto.id*, 2020 <<https://tirto.id/jelang-soeharto-lengser-sebagian-abri-hijau-menjadi-abri-kuning-fCdb>> [accessed 24 January 2023].

Faktor Habibie harus diperhitungkan. Meskipun Soeharto, seperti kebiasaannya, kemungkinan besar mengumumkan rencananya hanya beberapa hari sebelum sidang paripurna MPR 1998, spekulasi tentang penggantinya beredar di sekitar Habibie. Ada yang berpendapat bahwa Soeharto menunjuk Habibie sebagai penggantinya. Namun, beberapa pihak yang tidak yakin bahwa Soeharto akan turun pada tahun 1998, meramalkan bahwa Habibie akan menjadi wakil presiden. Meski Habibie sangat populer di kalangan tertentu, terutama kelompok Islam dan teknokrat yang tertarik dengan ICMI, ada pihak lain yang tidak setuju dengan pencalonannya sebagai presiden atau wakil presiden. Kebetulan suara anti-Habibie banyak yang berasal dari ABRI. Pandangan yang dikemukakan Mayjen Sembiring Meliala beberapa waktu lalu masih mencerminkan perasaan banyak perwira ABRI saat ini.⁷

Jenderal Feisal dan Jenderal Hartono tidak hanya memiliki hubungan dekat dengan kelas Ikon, tetapi juga bersahabat dengan Habibie. Menurut Crouch, jelas keduanya tidak menunjukkan Habibie seperti perwira lainnya. Setidaknya mereka mau bekerja sama dengan Habibie.⁸

Crouch juga menulis bahwa meskipun kelompok Muslim selalu merasa disudutkan ABRI, sejak akhir 1980-an Soeharto memandang umat Islam yang terorganisasi di ICMI sebagai sekutu politik yang semakin penting. Beberapa petinggi ABRI saat itu tidak menyukai sikap Soeharto terhadap ICMI, namun dengan caranya

⁷ Harold Crouch, *Soeharto's New Order And Its Legacy: Essays In Honour* (Canberra: Australian National University Press, 2010).

⁸ Crouch, *Army and Politics In Indonesia*.

sendiri, Soeharto mengganti perwira anti ICMI dengan perwira pro ICMI.⁹

Di akhir tulisannya, Crouch mencatat bahwa strategi Soeharto sangat efektif dalam jangka pendek, namun belum tentu dalam jangka panjang. Meski para pimpinan ABRI saat ini menjaga hubungan baik dengan kelompok Islam perwakilan ICMI, sikap itu tidak meresapi ABRI yang selama ini curiga terhadap ormas Islam yang dianggap berbau neo-masyumi.¹⁰

Mencoba untuk tetap objektif, Crouch melakukan penyederhanaan yang berlebihan dan generalisasi masalah. Misalnya, penggunaan istilah Neo Masyumi sulit dibenarkan. Siapa sebenarnya kepanjangan dari Neo-Masyum, Muhammadiyah, Paramadina, Persis, HMI, ICMI atau Golkar (disebut juga Neo-Masyumi pada Munas 1993)?

Apa indikator yang digunakan Crouch untuk mengatakan bahwa ABRI begitu lama memendam kebencian terhadap Islam? Kata-kata petinggi ABRI seperti Sembiring Meliala belum tentu mencerminkan sikap ABRI. Tidak apa-apa jika Crouch berpikir demikian. Politik sering ditandai dengan klaim dan legitimasi.¹¹

Dengan menggunakan logika Crouch tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap Feisal dan Hartono dalam menjaga hubungan baik dengan umat Islam, yang sesuai dengan posisi Soeharto, tidak mendapat dukungan ABRI. Pada akhirnya, ABRI dan

⁹ Crouch, *Soeharto's New Order And Its Legacy: Essays In Honour*.

¹⁰ Husaini.

¹¹ Husaini.

Soeharto berpisah.

Crouch itu tendensius. Di dalam surat tanggapannya terhadap tulisan tersebut, ia antara lain menulis: "Tuan tentu tahu juga bahwa yang Tuan sebut 'kaum militer' itu kebanyakan adalah orang-orang Islam juga. Bahkan banyak pemimpin mereka, sejak dibentuknya embrio militer, yang bermula dari Peta dan BKR, adalah pemimpin-pemimpin Islam. Tetapi sekali masuk dinas militer, mereka terikat oleh disiplin militer, dan yang Tuan sebut golongan Islam itu terbagi dalam beberapa kelompok partai politik, yang sekali waktu memegang kekuasaan dan pada waktu lain berada dalam barisan oposisi."¹²

Menurut para pengamat politik yang kerap mengkritik kekuasaan ini, ketika Benny Moerdani, Panggabean dan Sudomo mengisi posisi-posisi kunci, mereka tidak diusung oleh siapapun sebagai jenderal-jenderal Kristen untuk diperhatikan. Dari perspektif ini mungkin bisa dilihat berbagai upaya keras untuk membentuk opini atas perbedaan pendapat bahkan konflik antara Jenderal Faisal Tanjung/Hartono dengan faksi-faksi lain di dalam ABRI dan terakhir antara Soeharto dan ABRI. Di dalam bukunya, Adam Schwarz¹³ menjelaskan bahwa dukungan ABRI terhadap Suharto melemah. Ia berdiri di belakang Soeharto mendukung kelahiran ICMI sama seperti Sukarno membutuhkan dukungan PKI setelah dukungan militer menurun.

¹² Z.A Maulani, 'Ramai-Ramai Mengeroyok Habibie', *Majalah Media Dakwah*, 1995.

¹³ Adam Schwarz, *A Nation in Waiting : Indonesia's Search for Stability* (Singapore: Talisman Publishing, 2005).

Ketika pulang dari Jerman ke Indonesia atas permintaan Soeharto pada 1974, Habibie dipandang sebagai sosok pemecah masalah terkait program-program pembangunan Orde Baru yang ambisius. Impian Soeharto tentang "era zaman", yang ditakdirkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia, bisa dimulai dengan kedatangan Habibie. Citra memadukan iptek dan imtaq (iman dan taqwa) juga membuat Habibie mudah diterima dan dekat dengan muslim modernis perkotaan. Habibie bisa mendapat dukungan politik dari kelompok ini.¹⁴ Soeharto paham betul situasi itu. Di saat yang sama, pada awal 1990-an, Soeharto mulai melepaskan ketergantungannya dari militer, dan mulai tidak percaya kepada kelompok militer.

5.3 Respon Soeharto terhadap berdirinya ICMI

Masalah hubungan antara agama dan negara di zaman modern ini merupakan salah satu pertanyaan penting, dan meskipun telah diperdebatkan oleh para pemikir Islam selama hampir satu abad, hal itu masih belum sepenuhnya terjawab.¹⁵ Fenomena yang luar biasa ini mungkin disebabkan oleh keniscayaan konsep negara dalam kehidupan sosial masyarakat di daerah tertentu.

Negara diperlukan untuk menata kehidupan sosial bersama dan mewujudkan cita-cita masyarakat. Di sini otoritas politik memiliki urgensi dan harus

¹⁴ Ardanareswari.

¹⁵ Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras Di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002, Hlm. 100.

direpresentasikan dalam bentuk lembaga yang disebut negara. Berdasarkan realitas tersebut, perlu dirumuskan konsep negara di kalangan umat Islam.¹⁶

Idealisme dan aktivisme generasi awal aktivis politik Islam diwarnai oleh formalisme dan legalisme. Perwujudan utama dari gagasan dan praktik tersebut adalah keinginan para aktivisnya untuk mendirikan negara Islam atau negara yang berdasarkan ideologi Islam. Kegagalan untuk mencapai tujuan ini juga karena tidak didukung oleh semua umat Islam, dan hubungan politik yang sumbang antara Islam dan negara terus berlanjut di Indonesia.¹⁷

Iklim politik yang sumbang memiliki dampak yang luas. Pada puncaknya, terutama selama 25 tahun pertama pemerintahan Orde Baru, akses para aktivis politik Islam ke koridor kekuasaan sangat berkurang dan status politik mereka merosot. Tanda jelas kekalahan Islam politik. Beberapa contohnya adalah: Pada tahun 1968, pengusiran mantan tokoh kunci Masyumi dari partai yang baru dibentuk, Parumsi, untuk menggantikannya. Ia membatasi jumlah partai Islam dari empat (NU, MI, PSII, dan Perti) menjadi salah satu partainya PPP (1973). Penurunan jumlah perwakilan Muslim di parlemen dan kabinet.

Dengan penyatuan Pancasila, Islam tidak lagi diakui sebagai dasar organisasi sosial dan politik (1985). Lebih menyedihkan lagi, politik Islam menjadi sasaran

¹⁶ Kamaruzzaman, *Relasi Islam Dan Negara: Perspektif Modernis Dan Fundamentalis*, Magelang: Yayasan Indonesia Tera (Anggota IKAPI), 2001, Hlm. V.

¹⁷ Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998, Hlm. 270.

kecurigaan ideologis. Negara ini sering mencurigai para aktivis politik Islam Pancasila berideologi anti-negara.¹⁸

Pada tahap tertentu, kesimpulan ini dapat dijelaskan secara lebih mendalam terhadap apa yang sering disebut adaptasi nasional terhadap Islam. Islam mulai “diterima” oleh negara pada akhir 1980-an dan 1990-an. Bahtiar Effendi, penganjur "Teori Akomodasi", merumuskan empat bentuk "penerimaan" Islam di suatu bangsa. *Pertama*, akomodasi struktural yang ditandai dengan rekrutmen pemikir dan aktivis politik Islam ke dalam birokrasi, baik eksekutif maupun legislatif. Puncak dari penyesuaian struktural ini adalah berdirinya Institut Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dipimpin oleh BJ. Habibie pada tahun 1990.

Kedua, akomodasi legislasi, yaitu diberlakukannya beberapa peraturan dan undang-undang yang secara khusus mengatur kehidupan beragama umat Islam. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri. Kebijakan jilbab diubah pada tahun 1991. Penerbitan Keputusan Bersama Tingkat Menteri tentang Lembaga Amir Zakat, Infak dan Sadhaka (Bajis). Dan pada tahun 1993 SDSB dihapuskan.

¹⁸ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam Pertautan Agama, Negara Dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Printika, 2001, Hlm. 36.

Ketiga, akomodasi budaya, yaitu seringnya penggunaan simbol-simbol Islam, seperti seringnya penggunaan “istilah agama” dan idiom-idiom Islam lainnya dalam kosa kata instrumen politik dan ideologi bangsa. *Keempat*, pembangunan infrastruktur seperti pembangunan masjid di istana, Yayasan Amal Umat Islam Pancasila sebanyak 86, Majelis Ulama India (MUI), Bank Muamalat Indonesia (BMI).¹⁹ Pandangan seperti Bakhtia Effendi, dalam pandangannya, menunjukkan bahwa Islam sangat diuntungkan dengan penyesuaian ini, karena menurut pandangannya tumbuhnya kesadaran dan minat Soeharto terhadap agama membuat pemerintah sangat ikhlas saat itu ditampilkan.

Sepintas, "teori akomodasi" Bahtiar Effendi menarik bagi umat Islam. Di satu sisi, negara senang umat Islam dibiarkan "menjinakkan" diri dengan euforia. Umat Islam, di sisi lain merasa puas karena perjuangan mereka dianggap “berhasil” melalui penyertaan dan penerimaan sebagian kepentingan teologis umat Islam dalam struktur nasional.

Kebijakan politik pemerintahan Orde Baru menyebabkan partai-partai Islam mengalami pasang surut yang disebabkan oleh tiga faktor²⁰. *Pertama*, intervensi negara yang berlebihan (melalui birokrasi politik). Pada tahun 1968 ketiadaan birokrasi pemerintahan atau politik tampak jelas pada awal Orde Baru ketika Parmus (partai

¹⁹ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam Pertautan Agama, Negara Dan Demokrasi, Yogyakarta: Galang Printika, 2001, Hlm. 36.*

²⁰ Ahmad Syafiiie Ma,arif, *Islam Politik Teori Belah Bambu Masa demokrasi terpimpin (1959-1965), (Jakarta: Gema Insani Press, 1966), h. 45.*

Islam Indonesia) tidak diterima karena pemimpinnya dipandang sebagai mantan pemimpin Masyumi.

Pada tahun 1973 ada kegiatan partai-partai Islam dan pada tahun 1977 muncul Pedoman Memahami dan Menghayati Pancasila (P4) yang kemudian menjadi TAP MPR NO. II tahun 1978, yang termasuk arus kepercayaan di dalamnya. Dan pada tahun 1985 pemerintah menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal dari semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan (UU No.3/1985 dan UU No.8/1985).

Kedua, diferensiasi sosial (*social difference*), yang tidak hanya menyebabkan terpecahnya umat Islam dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang lain. Maraknya pendidikan Islam serta tuntutan era modernisasi dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah memunculkan berbagai gagasan ideologis, seperti keinginan untuk mendirikan negara Islam. *Ketiga*, ambiguitas konsep politik Islam itu sendiri, misalnya: konsep pemerintahan dan konsep imamah atau khilafah. Perbedaan penafsiran (tafsir) itu disebabkan perbedaan yang dialami umat Islam dalam pendidikan dan perbedaan firqah dalam akidah Islam.²¹

Barangkali karena fenomena-fenomena di atas itulah yang memberikan akses munculnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai sesuatu kekuatan kelas menengah muslim²², yang diharapkan mampu memahami dan mengangkat nilai-nilai Islam sebagai konsep-konsep ilmu pengetahuan yang menandingi konsep-konsep

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam*, terj. Abd Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, (Jakarta: Logos, 1996), h. 1-15.

²² Sodirman Tebba, *Islam Era Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), h. 7

pengetahuan yang berkembang dapat dikatakan sebagai “gerakan intelektual²³ yang lebih mandiri, bebas di dalam mengkontribusikan aspirasi-aspirasi Islam. Selain itu karena ICMI diorganisir berdasarkan agama Islam atau ikatan primordialisme (kerakyatan) yang menimbulkan pro dan kontra merupakan perkumpulan dari cendekiawan yang berpendidikan. Hal ini berarti bahwa para cendekiawan tersebut akan mampu memahami dan menjembatani aspirasi-aspirasi dari masyarakat Islam ke dalam pemerintah.

Pemberitaan media tentang berdirinya ICMI sering menggambarannya sebagai berdirinya lima mahasiswa secara spontan di Malang, Jawa Timur.²⁴ Menurut cerita, kelima santri ini taat, dan lebih dari itu, mereka adalah pemuda-pemuda muslim yang luar biasa yang berusaha mengumpulkan cendekiawan muslim untuk membicarakan masa depan bangsa dan umat. Untuk tujuan ini, mereka mengusulkan sebuah pertemuan yang akan mengundang para pemimpin organisasi Islam serta pemerintah dan media. Setelah ide tersebut menyebar di awal tahun 1990-an, para mahasiswa mendekati rektor Universitas Brawijaya (sebuah universitas negeri) dan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (dianggap sebagai universitas paling liberal di Indonesia) untuk mempresentasikan ide mereka. Kedua rektor menyambut simposium semacam itu tetapi ragu-ragu karena biaya dan sensitivitas politik. Lima pemuda mengunjungi pusat-pusat spiritual Islam di Jawa atas inisiatif sendiri dan

²³ Ibid.,

²⁴ Lihat, Sebagai Contoh, Catatan Tentang Peran Mahasiswa Tersebut, ‘Presiden Soeharto Buka Simposium Cendekiawan,’ Pelita, 6 Desember 1990, Dan Kompas, ‘ICMI Jaring Cendekiawan Dengan Konsep Minimal,’ 5 Desember 1990.

dengan biaya sendiri tanpa ada kekecewaan untuk menyampaikan ide-ide tersebut dan mengumpulkan dana untuk simposium yang direncanakan.

Dalam perjalanan itu mereka bertemu dengan beberapa cendekiawan Muslim terkemuka, terutama Dr. M. Imaduddin Abdul Rahim dan Drs. M. Dawan Rahardjo yang bersama-sama mengusulkan agar para mahasiswa memperluas gagasan penyelenggaraan simposium bersih hingga mendirikan perhimpunan nasional cendekiawan muslim.²⁵

Menyadari pentingnya dukungan pemerintah untuk keberlangsungan organisasi, jika memang harus dibentuk, Imaduddin menyarankan kepada para mahasiswa agar Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim dan Menteri Riset dan Teknologi Dr. mengundang BJ Habibie untuk memimpin konferensi nasional. Komitmen Emil Salim terhadap Islam dan reputasinya sebagai sosok yang toleran dan baik hati banyak dikenal di media nasional. Meskipun Imaduddin dan para mahasiswa tidak saling mengenal secara pribadi, Dr. Habibie menjadi akrab dengan wawancara televisi dan cerita tentang dia di surat kabar Islam populer Kiblat, di mana menteri berbicara dengan hangat tentang Islam.²⁶

Pada pertemuan berikutnya, Emil Salim setuju untuk berpartisipasi dalam simposium nasional tetapi menolak untuk memimpin organisasi dengan alasan dia

²⁵ Hasil Wawancara Hefner Dengan Imaduddin Abdulrahim, Safii Anwar, Dawam Rahardjo, Nurcholish Madjid, Wardiman Djojonegoro Dan Aswab Mahasin Pada Bulan Agustus 1992 Dan Juni-Juli 1993.

²⁶ Hasil Wawancara Hefner Dengan Imaduddin, 18 Juni 1993.

terlalu tua dan Habibie lebih efisien dan energik. Para mahasiswa kemudian menghubungi Habibie untuk memimpin organisasi tersebut, yang mengusulkan nama ISMI (Ikatan Sarjana Muslim Indonesia) kepada Nurcholish Madjid. Dihubungi melalui surat dan telepon, Habibie awalnya menolak bertemu dengan kelima mahasiswa tersebut.

Menurut rekan-rekan dekatnya, dia mengatakan secara pribadi bahwa terlepas dari komitmennya yang baik dan jelas terhadap Islam, dia tidak bisa membaca ajaran Islam dengan cukup baik untuk mempertahankan kepemimpinannya. Habibie secara pribadi membantah: "Bagaimana peneliti melakukannya? Peneliti seorang insinyur dan pembuat pesawat, bukan ahli Islam!" Dia juga dikabarkan khawatir bahwa asumsinya tentang kepemimpinan organisasi akan bertentangan dengan harapan Presiden Soeharto.

Baru setelah mantan Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara menghubungi Habibie, dia setuju bertemu dengan para mahasiswa. Usulan Imaduddin itu pula yang membuat para mahasiswa mengekang kekangan Habibie melalui Alamsyah, dan taktik itu berhasil. Mahasiswa dan pendukungnya berkesempatan untuk bertemu Habibie.

Maka, pada tanggal 23 Agustus 1990, mahasiswa yang didampingi oleh Imaduddin, Dawan Rahardjo dan M Syafii Anwar (sahabat dekat Rahardjo dan mantan

redaktur mingguan Muslim Panji Masyarakat) mengunjungi Dr. Habibie di Jl. Thamrin membuat permintaan resmi kepada menteri. Kelompok itu berjalan satu setengah jam ke pertemuan itu. Para mahasiswa dan pendukungnya langsung memunculkan ide-ide yang mengalir seperti monolog yang panjang dan menegangkan, menurut salah satu yang hadir.

Habibie kemudian menanggapi positif gagasan tersebut, tetapi kembali memprotes bahwa dia bukan karakter yang tepat untuk peran tersebut, dengan menyatakan, seperti sebelumnya, dia tidak mempelajari masalah Islam dengan cermat. Namun, dia tidak serta merta menolak permintaan para mahasiswa, tetapi menginginkan sebuah petisi diedarkan di antara para intelektual Muslim terkemuka yang meminta dukungan mereka atas kepemimpinan organisasinya untuk mengesankan Presiden (dan tidak diragukan lagi orang Indonesia) bahwa seluruh komunitas Muslim mendukung mereka. Selain itu, dia meminta presiden untuk menjabarkan organisasi dan tujuan perkumpulan tersebut. "Peneliti asisten Presiden," katanya, "jadi peneliti harus meminta izinnya untuk bekerja sama dengan kalian."

Selama seminggu penuh berikutnya, Imaduddin, Dawan Rahardjo dan Nurcholish Madjid menyusun dokumen yang menguraikan tujuan organisasi dan menyatakan dukungan mereka kepada Habibie untuk memimpinya. Dokumen tersebut didistribusikan ke ulama Islam di Jakarta, Bogor, Bandung dan Yogyakarta; Pada akhirnya, 49 orang menandatangani. Pada saat yang sama, Habibie berdiskusi dengan beberapa rekannya di kabinet dan mengumpulkan saran mereka tentang

kebijakan yang akan diambilnya untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Dilaporkan bahwa mayoritas anggota dewan menolak permohonan tersebut. Salah satunya, Dr. Saleh Afiff (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) menasihatinya untuk tidak langsung menolak lamaran itu, melainkan meminta saran langsung dari Presiden Soeharto. Habibie setuju dan menyelesaikan timeline dengan presiden, pertama mengirimkan petisi dan menguraikan tujuan asosiasi.²⁷

Pertemuan itu tatap muka, tetapi diskusi yang terjadi sedikit banyak menjadi rahasia di antara anggota dewan. Menurut laporan itu, Habibie awalnya mengulangi keberatannya bahwa dia adalah seorang insinyur, pembuat pesawat terbang dan tidak memenuhi syarat untuk memimpin Ikatan Cendekiawan Islam. Kemudian, lebih lambat, dia dilaporkan menunjuk langsung ke Presiden dan berkata, "Lagi pula, jika peneliti memimpin organisasi ini, mungkin peneliti akan mundur dari Anda. Mungkin pemahaman peneliti dan pemahaman Anda tentang Islam berbeda?"

Sepanjang karirnya, Habibie telah menunjukkan kesetiaan yang tak terbantahkan kepada Presiden. Kedekatannya dengan presiden menjadi sumber kekuatan politik yang menentukan bagi Habibie, karena ia tidak memiliki basis politik yang memadai hingga ICMI terbentuk. Jadi pertanyaan yang dia hadapi mengarah langsung ke kehidupan politiknya.²⁸

²⁷ Robert W Hefner, *ICMI Dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia*, ed. by Endi Haryono (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995).

²⁸ Hefner, *ICMI Dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia*.

Presiden Soeharto dilaporkan mengisyaratkan upaya Habibie, dengan mengatakan, "Bagus, Anda bisa melakukannya." Kemudian, untuk menunjukkan penguasaan Islam pribadinya, Presiden meminta Habibie mengambil pulpen, membuka buku catatannya dan menulis. Selama dua jam berikutnya, menurut cerita, Presiden mendikte diskusi panjang tentang prinsip-prinsip dasar Islam, termasuk pentingnya sunnah, doa dan berbagai aspek Al-Qur'an. Di akhir kalimatnya, Presiden berkata: "Sekarang Anda tahu apa yang peneliti tahu." Dari demonstrasi tersebut, Habibie mengaku pengetahuan normatif Islam Presiden sangat baik dan menurut pemahamannya, keseluruhan pertemuan berlangsung selama enam jam, dan dari sinilah Habibie lahir dengan amanah penuh dari Presiden, perkumpulan-perkumpulan Islam di mana mereka berada angsung berpartisipasi.²⁹

Hadir antara lain Menteri Dalam Negeri Rudini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan, Menteri Perhubungan Azwar Anas, Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim, Menteri Muda Keuangan Nasruddin Sumintapura, Menteri Perencanaan Pembangunan Negara dan Presiden Bappenas Saleh Afiff serta Menteri Agama Munawir Sjadzali. Nurcholish Madjid dan Profesor Dr. Insinyur Baiquni, rekan dekat Habibie dari BPPT. Di antara hadirin, Menteri Rudini yang memiliki reputasi sebagai militer simpatik Kejawaen menyatakan penentangannya terhadap ICMI. Namun, menyadari dukungan Presiden terhadap organisasi tersebut, ia langsung setuju

²⁹ Hefner, *ICMI Dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia*.

untuk bergabung dengan organisasi tersebut.

Berbekal dukungan presiden dan pemerintah, Habibie kembali bertemu dengan mahasiswa dan pendukungnya pada 27 September dan mengabarkan bahwa presiden telah merestui inisiatif tersebut. Namun, sebagai syarat pengangkatan pimpinan, Habibie meminta izin untuk mendatangkan beberapa asisten BPPT menjadi pengurus ICMI. Di antara para kontributor tersebut adalah Dr. Wardiman Djojonegoro, seorang insinyur di BPPT yang kemudian menjadi bos Habibie di ICMI. Wardiman berlatar belakang Priyayi-Madura dan dikenal dengan pandangan Islam yang "nasionalis". Namun, di bulan-bulan berikutnya, ia terbukti sebagai pengurus yang mau berjuang untuk ICMI.³⁰

Dalam hal itu, seperti pada masa jabatannya nanti, dalam membangun BPPT, Habibie mengungkapkan keinginan akan kepemimpinan yang pragmatis dan loyal, ketimbang kelompok yang homogen berdasarkan ikatan ideologis. Penunjukan personel BPPT yang terpercaya untuk Komite Pengarah ICMI juga mencerminkan keprihatinannya yang dapat dipahami bahwa mengingat kecurigaan militer yang terus berlanjut, ICMI harus segera menunjukkan bahwa ICMI bukanlah organisasi politik, melainkan organisasi teknologi dan pendidikan.³¹ Pada pertemuan yang sama, Habibie

³⁰ Kalangan Pengamat Barat Melihat Penunjukan Wardiman Sebagai Pengurus ICMI Sebagai Upaya 'Meng-Abangan-Kan' ICMI. Mereka Yang Menenal Wardiman, Bagaimanapun, Mencatat Bahwa Apapun Latar Belakangnya, Ia Telah Keluar Dari Jalannya Sendiri Untuk Menunjukkan Ke.

³¹ *Pidato Habibie Dalam Simposium Di Malang Memperlihatkan Penekanan Yang Pragmatis, Menghabiskan Hampir Seluruh Pembahasannya Pada Tantangan Teknologi Di Abad XXI. Ketika Merujuk Pada Islam, Habibie Melakukannya Secara Umum, Menekankan Pentingnya Agama Dalam.*

mengusulkan untuk mengubah kata sarjana menjadi sarjana atas nama organisasi untuk menghindari kesan bahwa ICMI hanya untuk lulusan. Dia juga menyarankan diadakannya simposium nasional pertama organisasi itu pada awal Desember. Semua peserta setuju dan kemudian dibentuk tiga kelompok untuk mengkoordinir persiapan simposium yang akan diadakan di kampus Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur.³²

Berkat restu Presiden, persiapan pertemuan Desember berjalan lancar. Apa yang dimulai sebagai inisiatif non-negara oleh sekelompok cendekiawan Muslim, beberapa di antaranya memiliki hubungan yang kurang bersahabat dengan pemerintah, kini telah berkembang menjadi koalisi tingkat tinggi antara pemimpin pemerintah dan Muslim non-negara.

Para pimpinan Majelis Ulama Indonesia dibujuk untuk merencanakan pertemuan pada bulan Oktober dan November, serta Kantor Menteri Agama H. Munawir Sjadzal dan staf departemennya. Menteri Penerangan Harmoko juga terlibat aktif dalam perencanaan pertemuan tersebut, demikian pula Menteri Dalam Negeri Rudini dan tentu saja Habibie beserta jajarannya.

Namun perlu ditekankan bahwa ormas Islam tetap berperan penting dalam persiapan-persiapan.³³ Imaduddin Abdulrahim, Dawan Rahardjo dan Nurcholish

³² Hefner, *ICMI Dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia*.

³³ Mereka Yang Duduk Pada Panitia Pengarah Adalah Dawam Rahardjo, Sri Bintang Pamungkas Dan Muslimin Nasution. Nasution Yang Memimpin Biro Riset Dan Pembangunan Departemen Koperasi, Dan Karenanya Bisa Dipandang Sebagai Muslim 'Pemerintah'. Dawam Dan Bintang,.

Madjid semuanya aktif di panitia pengarah terakhir. Keterlibatan Imaduddin di liga ini luar biasa karena hubungannya dengan pemerintah kurang baik selama ini.

Tidak semua kritikus Islam mendukung cita-cita ICMI. Misalnya, Deliar Noer, ulama terkenal dari generasi sebelum Madjid, menolak bergabung karena dua alasan: *pertama*, Habibie sendiri belum pernah menunjukkan komitmen yang mendalam terhadap Islam, dan *kedua*, ICMI bukanlah organisasi yang mewakili Islam tetapi hanya dirancang untuk memilih kembali Presiden Soeharto.

Yang lainnya, seperti sejarawan Taufik Abdullah, menolak untuk bergabung meski sudah berkali-kali diundang, dengan alasan birokrasi terlalu menguasai ICMI. Namun, seperti banyak peneliti independen lainnya, Abdullah menahan diri untuk tidak mengkritik ICMI secara terbuka. Secara pribadi, ia mengakui bahwa organisasi tersebut sangat sukses.³⁴

Yang lain, bahkan tanpa ragu, mengkritik ICMI dengan alasan bahwa organisasi ini mempromosikan sikap sektarian pada saat toleransi antaragama dan semangat nasionalisme demokratis diperlukan. Misalnya, Djohan Effendi, Madjid dan Rahardjo di masa awal gerakan pembaruan Islam dan kini bekerja di Kementerian Agama (dan sejak April 1993 di Asisten Khusus Departemen Agama, Dr. Moerdiono), namun dengan tegas mengingatkan bahwa ICMI kembali mempolitisasi Islam.

³⁴ Hasil Wawancara Hefner Dengan Taufik Abdullah, 24 Juni 1993. Meskipun Mengkhawatirkan Dominasi Birokrat Dalam ICMI, Abdullah Menolak Kesimpulan Sejumlah Pengamat Barat Bahwa ICMI Dikembangkan Semata-Mata Untuk Memberikan Dukungan Politik Bagi Soeharto Dan.

Dengan melakukan itu, menurutnya, ICMI berisiko merusak inti kesuksesan budaya Islam, dan pada akhirnya bahkan membuat militer melawan mereka yang menggunakan Islam untuk tujuan politik. Ketua Nahdlatul Ulama, Abdurrahman Wahid, juga menuding ICMI menanam sektarianisme.

Meski diundang secara pribadi oleh Habibie, yang menjenguknya pada Februari 1991 ketika dia di rumah sakit, Gus Dur menolak untuk bergabung, mengklaim bahwa fokus ICMI adalah "eksklusif" dan elitis daripada pan-Indonesia. Ridwan Saidi, presiden HMI 1974-1977 dan mantan aktivis PPP, mengkritik ICMI dengan alasan yang sama dan menuduh ICMI hanya mencerminkan pendapat khusus birokrasi Islam.³⁵

Kritik Wahid banyak diberitakan di media. Dia berargumen bahwa dalam momen bersejarah seperti saat ini, perjuangan untuk demokrasi dan keadilan harus lebih penting daripada masalah kecil, bahkan dalam masyarakat Muslim. Wahid menggambarkan argumennya dengan istilah yang sangat kuat, bahkan mengejutkan beberapa pendukung Muslimnya sendiri. "Peneliti bekerja untuk rakyat Indonesia, bukan hanya untuk Islam," ujarnya di beberapa acara publik. Menurut Wahid, Islam tidak harus ditransformasikan menjadi ideologi untuk dilihat sebagai satu-satunya landasan demokrasi, hukum, atau keadilan ekonomi.

³⁵ Hasil Wawancara Hefner Dengan Ridwan Saidi Dan Abdurrahman Wahid, Juli 1992. Kedua Tokoh Ini Juga Mengomentari Bahwa Mereka Merasa Bahwa ICMI Menderita Karena Visi Birokratik Khusus Dari Islam. Tema Yang Sama Dilontarkan Lewat Pernyataan Pers Nahdlatul UI.

Sebaliknya, Islam harus menjadi "dasar inspirasi bagi rencana nasional untuk masyarakat yang demokratis."³⁶ Dalam banyak wawancara, Gus Dur mengemukakan kekhawatiran lebih lanjut bahwa ICMI, dengan dukungan berbagai pejabat pemerintah, dapat digunakan untuk mempromosikan Islam eksklusif yang kompleks dan bertentangan dengan sejarah panjang toleransi Islam di Indonesia. Penting bahwa meskipun dikritik, Wahid tidak melarang warga NU bergabung dengan ICMI dan beberapa tokoh NU melarangnya.³⁷

Keberagaman ini memperkuat semangat dialog yang terwujud dalam Kongres 1 ICMI pada pukul 18.00 hingga 20.00 WIB. Desember 1990. Sebagian besar pembicara yang dihadirkan bernada akademis ketat, hati-hati bahkan kering; Publikasi jurnal mereka bahkan memuat bibliografi yang panjang. Namun, sebenarnya isi tulisan yang disampaikan sangat bervariasi. Mayoritas menyambut baik pidato Presiden Soeharto yang mendukung tujuan rencana pembangunan 25 tahun pertama abad ke-21. Penekanan ini sesuai dengan judul simposium, "Membangun Masyarakat Indonesia Abad 21" dan tidak terkait dengan isu-isu penting konsep islami.

³⁶ 'Indonesia's Muslim Middle Class: An Imperative or a Choice?' *Dalam The Politics of Middle Class Indonesia, Ed., Tanter and Young, Hlm. 22, Lihat Juga Pernyataannya Yang Mendua Tentang ICMI Dalam Tempo, 3 Desember 1990, Hlm.29.*

³⁷ *Posisi Wahid Tentu Saja Berhubungan Dengan Upayanya Membangun Koalisi Non-Pemerintah Dan Non-Denominasional Bagi Bagi Demokrasi Melalui Pendirian Forum Demokrasi. Para Pengkritik Wahid Menyatakan Bahwa Upaya Ini Berhubungan Dengan Menteri Pertahanan Dan K.*

Sebuah artikel yang disajikan oleh kontributor Habibie menekankan hal yang sama, menekankan pentingnya teknologi dalam industrialisasi tahap lanjut di Indonesia dan menyerukan umat Islam untuk memainkan peran yang menentukan dalam pembangunan Indonesia dengan menguasai pengetahuan dan teknologi baru.³⁸



³⁸ Hefner, *ICMI Dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia*.